



# Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah

Dr. Ahmad Adib Susilo, S.E., M.Sc., Ak.,  
CGAE, CA, CSFA, ERMCP, CGCAE, CFrA

Online Discussion IAI KASP  
Jakarta, 7 Maret 2024

# Agenda

**Overview Pemeriksaan LK  
Pemerintah**

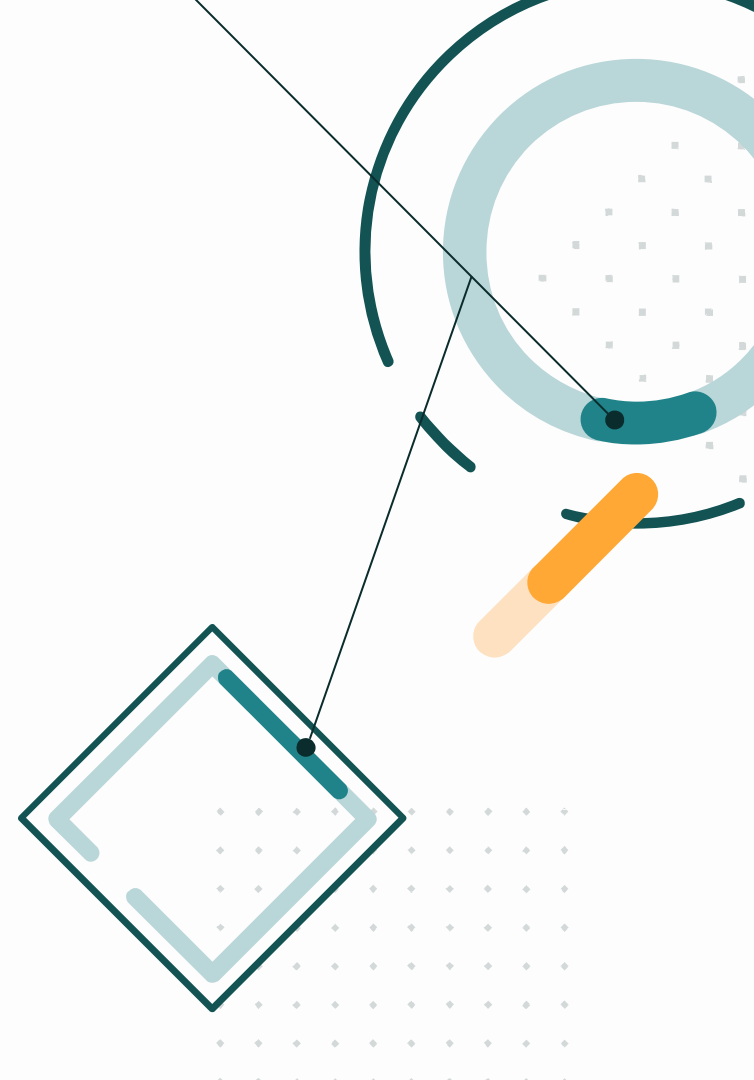
**Pemanfaatan Big Data  
Analytic dalam Pemeriksaan**

**Perumusan Opini dan  
Temuan Pemeriksaan**

01

02

03





# 01

## Overview Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah

# Tujuan dan Asersi

## Tujuan

- a. Kesesuaian laporan keuangan yang diperiksa dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan sesuai dengan yang diatur dalam SAP;
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

## Asersi

- a. Asersi tentang golongan transaksi dan peristiwa untuk periode yang diperiksa:
  - 1) Keterjadian; 2) Kelengkapan; 3) Keakurasian
  - 4) Pisah batas ;5) Klasifikasi
- b. Asersi tentang saldo akun akhir periode
  - 1) Eksistensi; 2) Hak dan kewajiban;
  - 3) Kelengkapan ; 4) Penilaian & alokasi
- c. Asersi tentang penyajian dan pengungkapan:
  - 1) Keterjadian serta hak dan kewajiban ;
  - 2) Kelengkapan 3) Klasifikasi dan keterpahaman;
  - 4) Keakurasian dan penilaian)



# METODOLOGI PEMERIKSAAN KEUANGAN

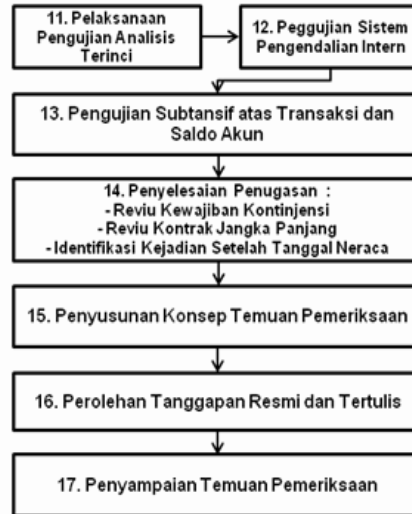
## Ukuran Kinerja Pemeriksaan:

- Standar Pemeriksaan
- Panduan Manajemen Pemeriksaan
- Tujuan dan Harapan Penugasan

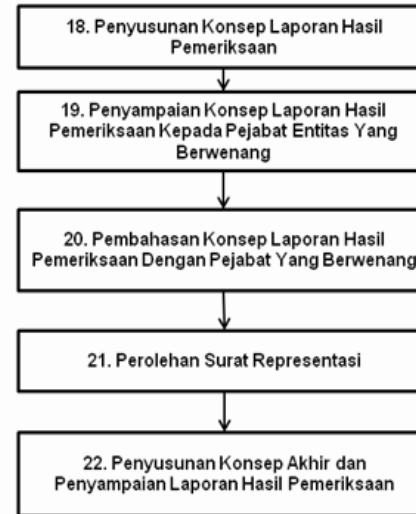
### PERENCANAAN PEMERIKSAAN



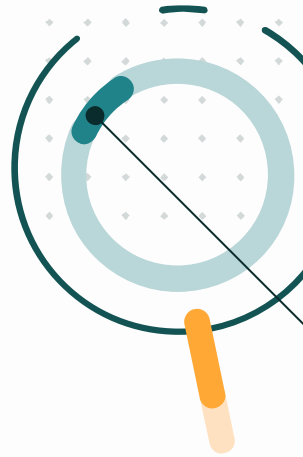
### PELAKSANAAN PEMERIKSAAN



### PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN



**SUPERVISI - KENDALI DAN PENJAMINAN MUTU**  
(Supervision, Quality Control & Assurance)



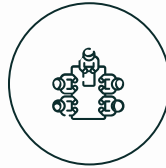
# Prosedur Pemeriksaan



## Teknik Audit

Pemeriksa menerapkan 7 Teknik Audit yang meliputi

- Inspeksi,
- Konfirmasi,
- Observasi,
- Penghitungan Ulang,
- Pelaksanaan Kembali,
- Prosedur Analitis, dan
- Permintaan Keterangan



## SiAP LK

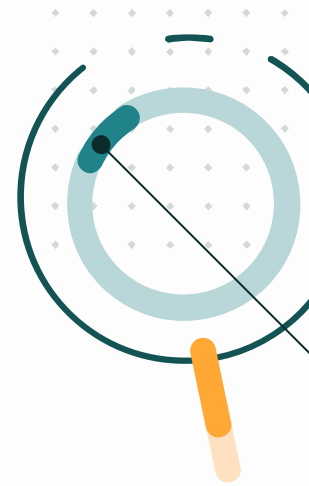
Aplikasi manajemen pemeriksaan yang menyediakan prosedur pemeriksaan standar berdasarkan hasil penilaian risiko

Tim pemeriksa dapat mengembangkan prosedur pemeriksaan berdasarkan hasil penilaian risiko masing-masing entitas



## Big Data Analytic

Pemeriksa memanfaatkan *Big Data Analytics* untuk mendapatkan symptom atas adanya kejadian yang outlier atau irregular dengan cara mendapatkan pola dari suatu kumpulan data, memprediksi suatu nilai, atau memvisualisasikan kumpulan data.





**02**

**Pemanfaatan Big Data  
Analytics**

# Data Universe BPK

## Tantangan : Kompleksitas *Auditee* dan Volume Data

### Entitas/Auditee:

87 Kementerian  
542 Pemda  
107 BUMN  
>1.100 BUMD

### Data Keuangan

Laporan Keuangan  
(Neraca, LRA, LO, LPE,  
LAK, LPSAL, CALK)  
beserta jurnal dan seluruh  
data/dokumen pendukung



### Data Non Keuangan

Program Bantuan Sosial (275 juta  
Penerima Manfaat/PM):  
- Bantuan Pangan Non Tunai (15.2  
juta PM)  
- Bantuan Sosial Tunai (10 juta PM)  
- BPJS Kesehatan (96.8 juta PM)  
- Bantuan Siswa Miskin (18.7 jt PM)

### Data pada Domain Publik

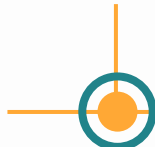
- Data InaProc (Pengadaan Barang, Jasa  
Pemerintah)  
- Sosial Media



# Proses Bisnis

Pengajuan  
"Interesting  
Question"

**Auditor**



**01**

**INISIASI**

**02  
INPUT**

**IT Division**

Data Acquisition

Data Processing  
& Data Mining

**IT Division**

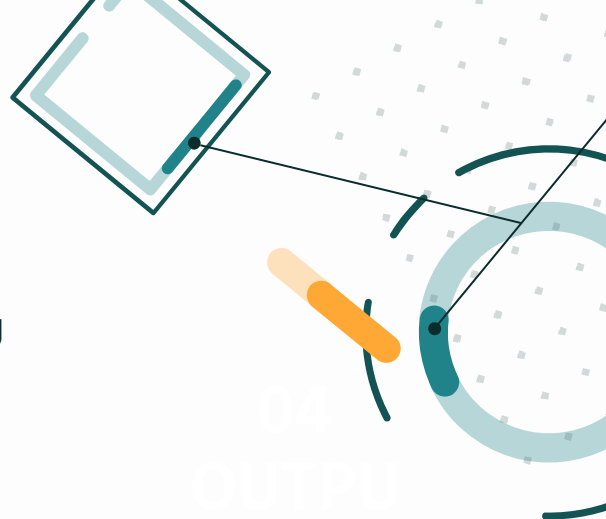


**03**

**PROSES**

**Auditor**

- 1. Descriptive Analytics
- 2. Diagnostic Analytics
- 3. Predictive Analytics



# Dashboard



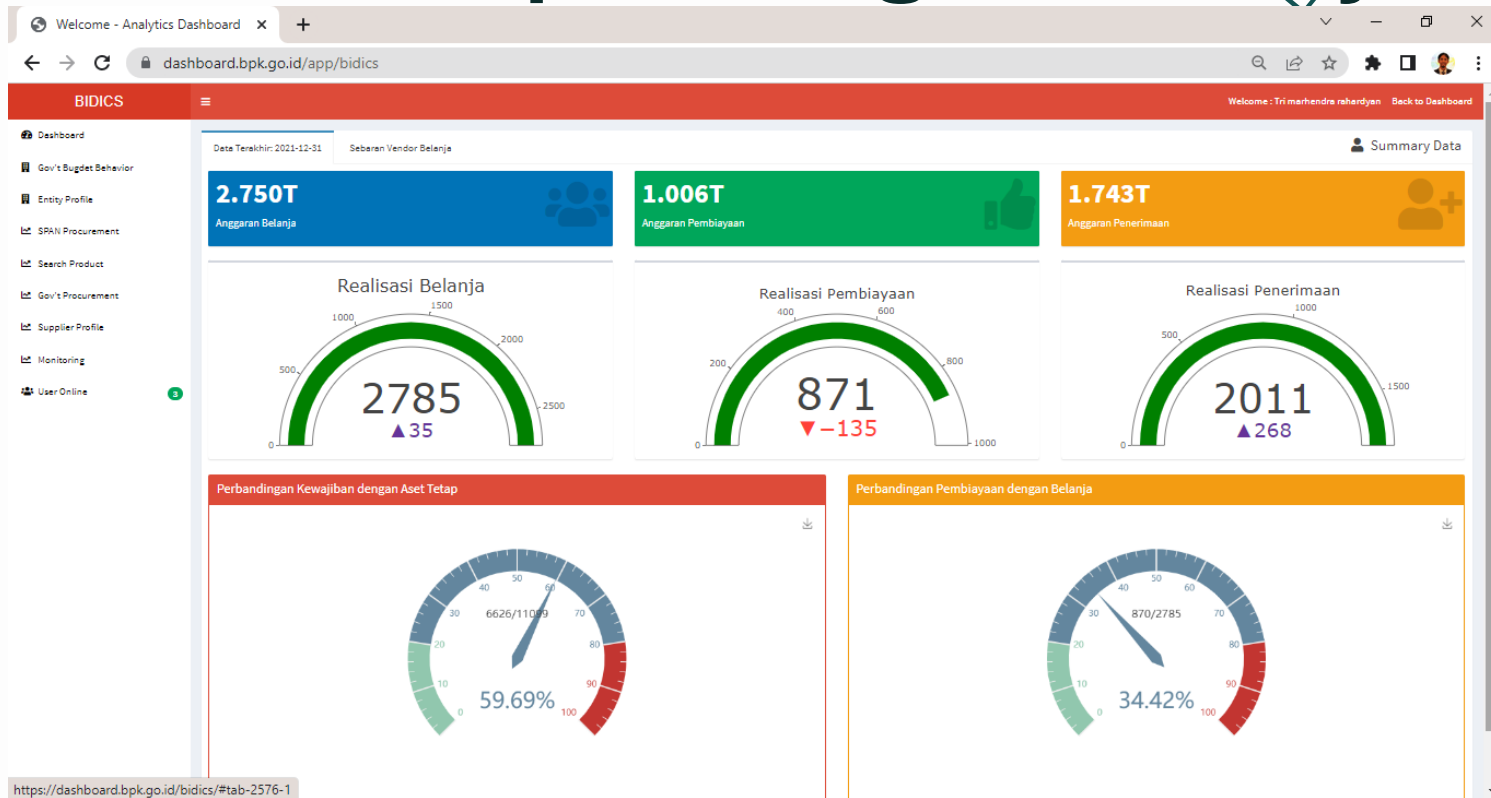
## Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

1. Trend Belanja Pemerintah
2. Profil Entitas
3. Penganggaran Pemerintah
4. Produk E-catalogue
5. Profile Vendor
6. Database Pengadaan Barang Jasa
7. Data Hibah Pemda ke KL

## Database Lainnya

1. Database ASN
2. Data NTPN
3. Data Penerbangan
4. Database Penerima Bantuan Sosial - DTKS

# Dashboard Aplikasi Big Data Analytics





# Contoh hasil Big Data Analytics : Anomali Dalam Pengadaan Barang Jasa

SPAN Procurement

Search Product

Gov't Procurement

Supplier Profile

Monitoring

User Online

Anomali Blacklist LKPP Pengadaan Blacklist Pengadaan Non RUP Tender Non Tender Search Analisis Prilaku Supplier

### Pemenang Bukan Harga Terendah

Show 10 entries

Instansi	Nama Paket	Winner		Lowest Price	
		NPWP Pemenang	NPWP Penawar Terendah	Winner Harga Pemenang*	Lowest Harga Terendah
Kepo	PERANGKAT YANG TERIN.	0289	0901	99.832.777.000	99.525.361.100
Kemri dan E	Pembangur	0100	0106	93.600.000.149	91.728.907.537
Kemri	PENGGANTIAN	0185	0145	91.024.026.210	78.300.237.700
		8422	0227	75.926.201.085	67.318.977.224
	Pembangunan Sarana dan Prasarana	3153	0106	74.307.470.767	69.546.306.744
	Pelebaran Jalan Nas	0151	0121	70.637.042.299	53.397.513.252
	Pengadaar	3126	7004	66.446.118.750	63.817.668.750
	Peningkatan dan Pen.	0233	0237	65.336.185.109	58.316.763.403
Kemri					
Kemri	Pembangunan Penyediaar	0130	0260	64.568.137.969	59.243.066.199
Kemri	Konsolidasi Pengawar	0307	7266	55.817.880.520	1.916.200.000

Showing 1 to 10 of 3,033 entries

Previous 1 2 3 4 5 ... 304 Next

Bidder's ID

Anomali : pemenang bukan harga terendah (perlu pendalaman)

# Contoh Lain Hasil BDA

## Perjalanan Dinas

Tiket pesawat Garuda yang dijadikan SPJ tidak ditemukan dalam database manifes penerbangan

## Bantuan Sosial

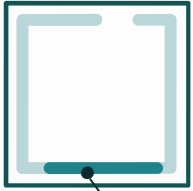
Bansos diterima oleh pihak yang tidak berhak : ASN, Pemilik usaha terdaftar, Telah meninggal

## Belanja Gaji

Gaji diterima oleh pihak yang sudah tidak berstatus ASN

## Pendapatan

Surat setoran pajak yang diadministrasikan oleh bendahara tidak terdapat dalam database penerimaan pajak





# 03

## Perumusan Opini dan Temuan Pemeriksaan

# Jenis Opini

## Wajar Tanpa Pengecualian

LK menyajikan informasi keuangan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan SAP

## Wajar Dengan Pengecualian

LK menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang yang dikecualikan: (1) penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji); (2) adanya pembatasan lingkup (ketidalcukupan bukti).

## Tidak Wajar

Penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) yang ditemukan baik secara individual maupun agregat adalah material dan pervasive (berpengaruh secara keseluruhan)

## Tidak Menyatakan Pendapat

Pembatasan lingkup yang luar biasa sehingga Pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti yang cukup memadai sebagai dasar menyatakan pendapat (opini)



# Dasar Perumusan Opini

## Kuantitatif

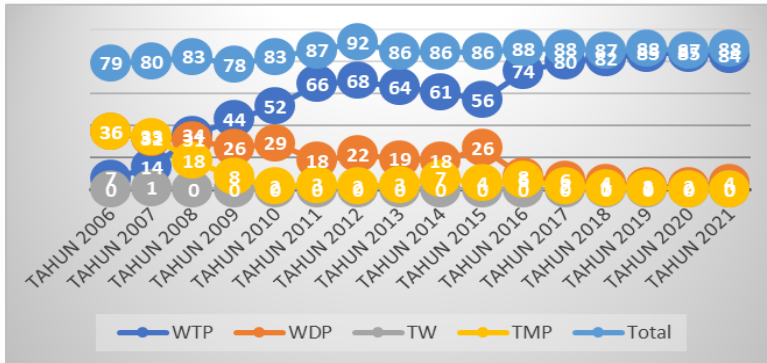
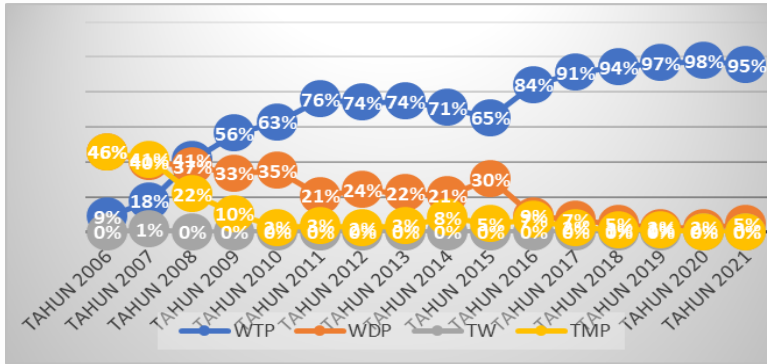
- a) Membandingkan total salah saji/potensi kesalahan yang ditemukan terhadap nilai *Overall Materiality* (OM)
- b) Membandingkan nilai salah saji pada tingkat akun dengan *Tollerable Misstatement* (TM) akun tersebut

## Kualitatif

- a) Salah saji atau potensi salah saji yang ditemukan dikaitkan dengan jenis asersi yang tidak dipenuhi.
- b) Tingkat kompleksitas, yaitu luas atau tidaknya akibat dari salah saji atau potensi salah saji, baik jumlah akun maupun jumlah laporan yang terpengaruh.
- c) Adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berindikasi fraud meskipun nilainya di bawah nilai materialitas.

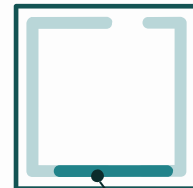
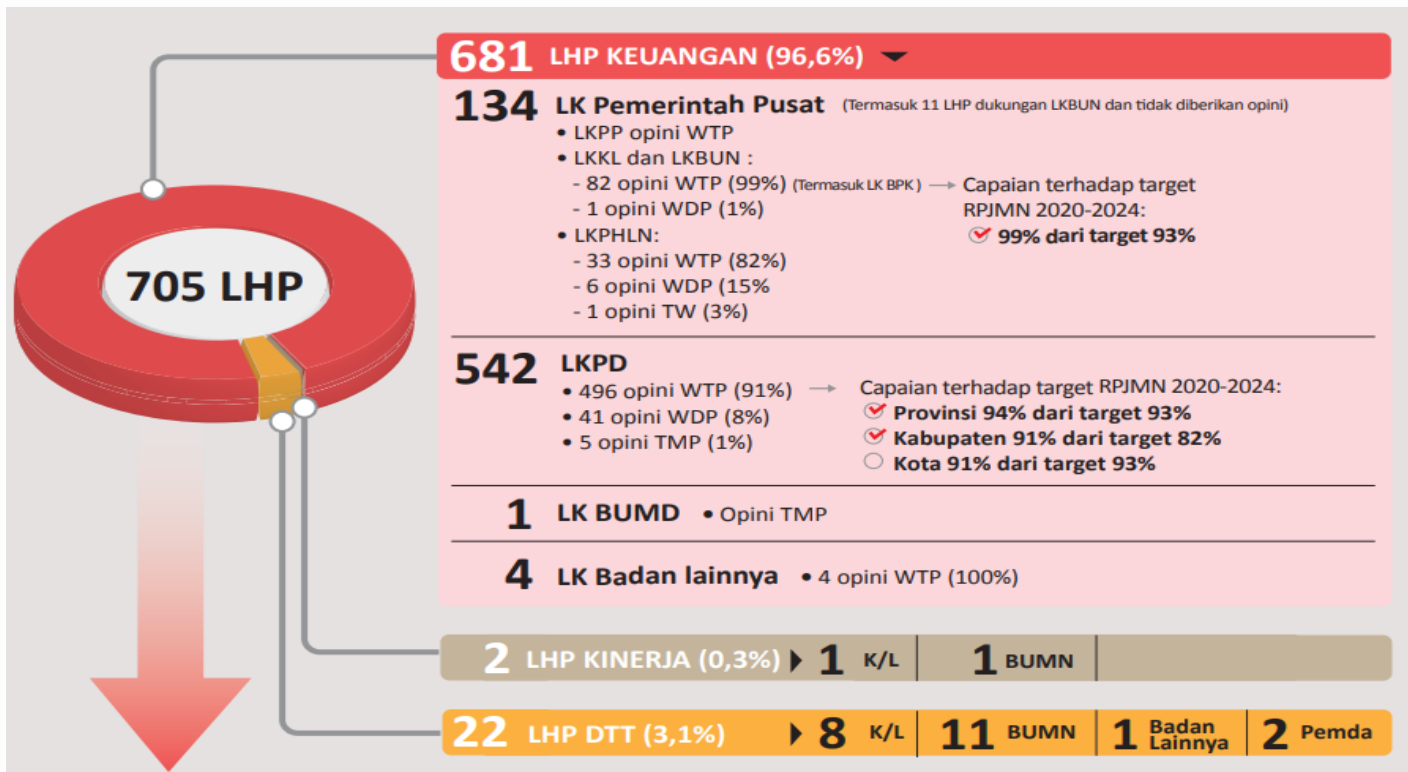


# Perkembangan Opini LK TA 2006 - 2021



LKKL dan LKBUN	Jumlah Entitas					Prosentase Entitas				
	WTP	WDP	TW	TMP	Total	WTP	WDP	TW	TMP	Total
Tahun 2006	7	36	0	36	79	9%	46%	0%	46%	100%
Tahun 2007	14	32	1	33	80	18%	40%	1%	41%	100%
Tahun 2008	34	31	0	18	83	41%	37%	0%	22%	100%
Tahun 2009	44	26	0	8	78	56%	33%	0%	10%	100%
Tahun 2010	52	29	0	2	83	63%	35%	0%	2%	100%
Tahun 2011	66	18	0	3	87	76%	21%	0%	3%	100%
Tahun 2012	68	22	0	2	92	74%	24%	0%	2%	100%
Tahun 2013	64	19	0	3	86	74%	22%	0%	3%	100%
Tahun 2014	61	18	0	7	86	71%	21%	0%	8%	100%
Tahun 2015	56	26	0	4	86	65%	30%	0%	5%	100%
Tahun 2016	74	8	0	6	88	84%	9%	0%	7%	100%
Tahun 2017	80	6	0	2	88	91%	7%	0%	2%	100%
Tahun 2018	82	4	0	1	87	94%	5%	0%	1%	100%
Tahun 2019	85	2	0	1	88	97%	2%	0%	1%	100%
Tahun 2020	85	2	0	0	87	98%	2%	0%	0%	100%
Tahun 2021	84	4	0	0	88	95%	5%	0%	0%	100%

# Opini TA 2022 (IHPS SMT 1 2023)



# Persepsi Publik Terkait Opini

## Mispersepsi

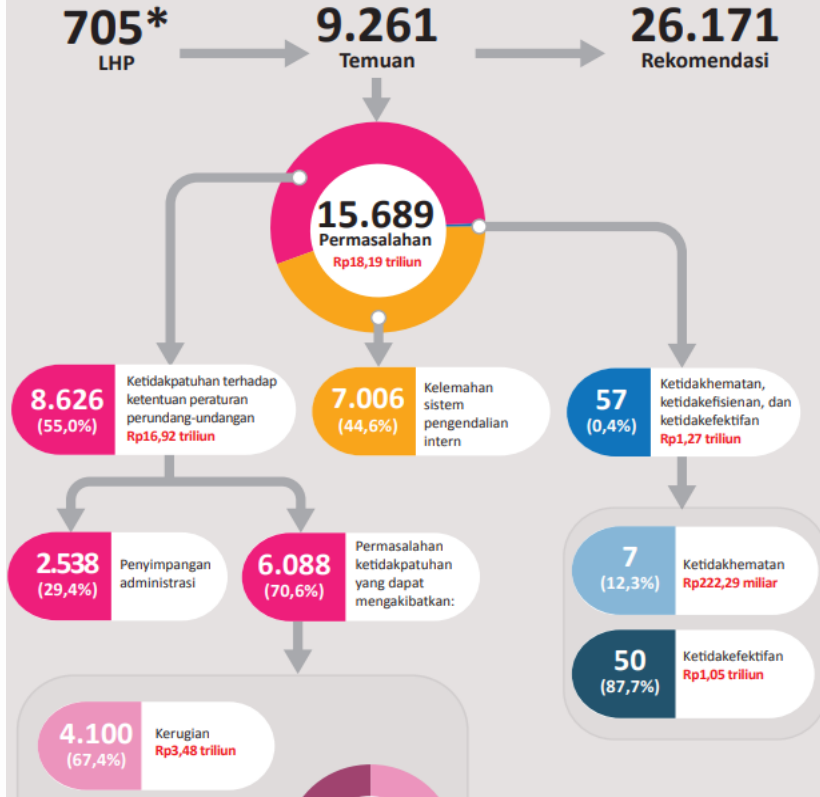
- a. Opini WTP menjamin LK Pemerintah terbebas dari Korupsi
- b. Publik mempertanyakan adanya Kementerian/Lembaga/Pemda yang mendapat opini WTP oleh BPK namun pejabat di KL/Pemda terkena OTT oleh APH

## Penjelasan

- a. Pemeriksaan LK memberikan penilaian tentang kewajaran bukan kebenaran, dengan keyakinan memadai, bukan mutlak/absolut
- b. Karakteristik *fraud* selalu bersifat tersembunyi (*fraud is hidden*). Pengungkapan *fraud* umumnya diawali pengaduan dan diperdalam melalui pemeriksaan kepatuhan (Investigatif)
- c. Prosedur audit dalam LK tidak dirancang khusus untuk mengungkap *fraud*. Selain itu terdapat risiko deteksi atas transaksi/unit kerja yang mengandung fraud namun tidak terpilih sebagai sampel



## HASIL PEMERIKSAAN BPK SEMESTER I TAHUN 2023



## Hasil Pemeriksaan : (Temuan SPI, Kepatuhan, Kerugian & Kekurangan Penerimaan)



Sumber : IHPS BPK Semester 1 2023

**Terima Kasih**

